

1. STOCK EXCHANGES
2. JANITORS

KIK
Das 12/01
Pru
t

SKRIPSI

ASTRI PRAMUDYARINI

**TANGGUNG GUGAT KUSTODIAN
DALAM TRANSAKSI BURSA EFEK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**TANGGUNG GUGAT KUSTODIAN
DALAM TRANSAKSI BURSA EFEK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

M. Zaidun. S.H., M.Si.
NIP. 130 517 145

Penyusun,

Astri Pramudyarini
NIM. 039714565

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

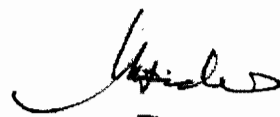
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

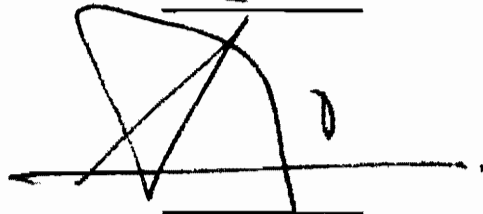
Ketua : Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.



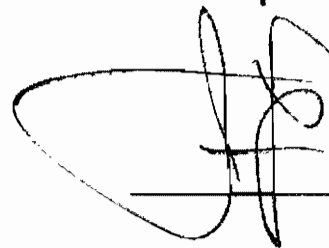
Anggota : 1. M. Zaidun, S.H., M.Si



2. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



3. Samzari Boentoro, S.H.



4. Sri Woelan Azis, S.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Lembaga Penunjang Pasar Modal yang menjalankan kegiatan sebagai Kustodian hanya dapat diselenggarakan oleh Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam yang dipersyaratkan dalam Undang Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Peranan Bank Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemilik Efek yang termasuk dalam penitipan kolektif. Dalam pengadministrasian Efek yang disimpan pada Bank Kustodian wajib dipisahkan dari harta Bank Kustodian. Bank Kustodian hanya dapat memindahkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberikan wewenang untuk bertindak atas namanya.
- b. Bank Kustodian mempunyai tanggung jawab hukum yang penting, terutama dalam hal penitipan Efek yang disimpan terhadap nasabahnya. Sehingga apabila Bank Kustodian tersebut terbukti melakukan kesalahan yang menjurus kearah manipulasi dan penipuan pencatatan Efek serta melakukan kelalaian dibidang pasar modal yang mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya, maka dimungkinkan terjadinya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh investor.

Adanya gugatan ganti kerugian secara perdata oleh pihak yang dirugikan dalam Pasal 111 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun yang menjadi kendala bagi investor adalah beban pembuktian yang ditanggung oleh investor sebagai penggugat dan proses peradilan yang memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

- c. Lembaga non litigasi yang salah satunya adalah arbitrase sangat membantu dalam penyelesaian perselisihan transaksi Bursa Efek , selain lebih efisien dan cepat, juga lebih mudah sebab dalam penyelesaiannya hanya dengan memilih pihak ketiga yaitu arbiter sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa. Peraturan mengenai Arbitrase sudah dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Saran

- a. Hendaknya diciptakan suatu mekanisme beban pembuktian yang pada pihak yang merugikan investor, karena tidak semua investor memahami seluk beluk pasar modal, selain itu pasar modal memerlukan suatu lembaga arbitrase yang khusus menangani perkara perdata dibidang pasar modal untuk mempercepat penyelesaian perkaranya, lembaga ini beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian dibidang pasar modal.
- b. Perlu diatur mengenai sistem sanksi yang mampu membuat jera pelanggar dan menjadi faktor pencegahan, terjadinya tindakan-tindakan yang cenderung bersifat distorsif dalam kegiatan jasa penitipan atau penyimpanan Efek. Hendaknya pula

dalam penerapan sanksi semestinya tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi harus juga dapat menyediakan berbagai alternatif penyelesaian bagi masyarakat pemodal maupun pihak pelaku pasar modal yang dirugikan akibat kesalahan yang terjadi.

- c. Hendaknya dibentuk arbiterase insitusional di bidang pasar modal, yang memiliki susunan organisasi dan memiliki daftar arbiter yang mempunyai keahlian di pasar modal. Sebab dengan dibentuknya arbiterase insitusional para nasabah/investor mendapat perlindungan hukum terhadap para pelaku pasar modal yang melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi nasabah/investor.